

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMETAAN DAN PEDOMAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 105 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100/2948/SJ tanggal 08 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN DAN PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PERTANAHAN.

Pasal 1

Pemetaan urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah hasil validasi untuk urusan pertanahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan berdasarkan nilai variabel urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Pasal 2

Nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan nilai hasil pemetaan berdasarkan indikator dan kelas interval urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diwadahi dalam bentuk dinas.
- (2) Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota dibagi dalam 3 (tiga) tipologi.
- (3) Tipologi dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. dinas Tipe A, untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja besar atau dengan nilai pemetaan lebih dari 800 (delapan ratus);
 - b. dinas Tipe B, untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja sedang atau dengan nilai pemetaan lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus);
 - c. dinas Tipe C, untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja kecil atau dengan nilai pemetaan lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus);
- (4) Untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan nilai pemetaan variabel urusan pemerintahan bidang pertanahan kurang dari 400 (empat ratus) selain yang dimaksud pada ayat (3) serta dimungkinkan untuk bergabung dengan urusan pemerintahan lainnya yang serumpun, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjadi Bidang untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja sangat kecil dengan nilai pemetaan lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus); dan

- b. menjadi Subbidang/Seksi untuk mewedahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja sangat sangat kecil dengan nilai pemetaan kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus).
- (5) Urusan pemerintahan lainnya yang serumpun dengan urusan pemerintahan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.
- (6) Dalam hal kemampuan keuangan atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah yang terbatas, tipe perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pertanahan dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 4

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan digunakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kelembagaan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 5

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pertanahan digunakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kelembagaan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
- (2) Pedoman penataan kelembagaan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembentukan dinas dan penggabungan urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan urusan pemerintahan lainnya yang serumpun, ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Provinsi dan kabupaten/kota yang belum melakukan pemetaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, wajib menyampaikan data indikator variabel umum dan variabel teknis kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kementerian yang menyelenggarakan urusan agraria/pertanahan.
- (2) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan tipologi dan nomenklatur dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1987

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 39 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PEMETAAN DAN PEDOMAN
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PERTANAHAN

**HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN 2016**

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	SKOR	KATEGORI	TIPELOGI
1	2	3	4	5
I	Provinsi Aceh	242	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
1	Kabupaten Aceh Barat	220	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
3	Kabupaten Aceh Besar	286	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
4	Kabupaten Aceh Jaya	264	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
5	Kabupaten Aceh Selatan	176	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
6	Kabupaten Aceh Singkil	286	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
7	Kabupaten Aceh Tamiang	528	KECIL	Dinas Tipe C
8	Kabupaten Aceh Tengah	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
9	Kabupaten Aceh Tenggara	528	KECIL	Dinas Tipe C
10	Kabupaten Aceh Timur	176	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
11	Kabupaten Aceh Utara	275	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
12	Kabupaten Bener Meriah	286	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
13	Kabupaten Bireuen	176	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
14	Kabupaten Gayo Lues	330	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
15	Kabupaten Nagan Raya	286	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
16	Kabupaten Pidie	231	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
17	Kabupaten Pidie Jaya	209	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
18	Kabupaten Simeulue	352	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
19	Kota Banda Aceh	407	KECIL	Dinas Tipe C
20	Kota Langsa	385	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
21	Kota Lhokseumawe	209	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
22	Kota Sabang	154	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
23	Kota Subulussalam	418	KECIL	Dinas Tipe C

1	2	3	4	5
II	Provinsi Sumatera Utara	220	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	1 Kabupaten Asahan	330	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	2 Kabupaten Batubara	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	3 Kabupaten Dairi	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	4 Kabupaten Deli Serdang	429	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Humbang Hasundutan	220	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	6 Kabupaten Karo	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	7 Kabupaten Labuhan Batu	550	KECIL	Dinas Tipe C
	8 Kabupaten Labuhanbatu Selatan	297	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	9 Kabupaten Labuhanbatu Utara	528	KECIL	Dinas Tipe C
	10 Kabupaten Langkat	297	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	11 Kabupaten Mandailing Natal	473	KECIL	Dinas Tipe C
	12 Kabupaten Nias	275	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	13 Kabupaten Nias Barat	682	SEDANG	Dinas Tipe B
	14 Kabupaten Nias Selatan	418	KECIL	Dinas Tipe C
	15 Kabupaten Nias Utara	682	SEDANG	Dinas Tipe B
	16 Kabupaten Padang Lawas	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	17 Kabupaten Padang Lawas Utara	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	18 Kabupaten Pakpak Bharat	341	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	19 Kabupaten Samosir	220	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	20 Kabupaten Serdang Bedagai	325	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	21 Kabupaten Simalungun	220	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	22 Kabupaten Tapanuli Selatan	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	23 Kabupaten Tapanuli Tengah	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	24 Kabupaten Tapanuli Utara	484	KECIL	Dinas Tipe C
	25 Kabupaten Toba Samosir	517	KECIL	Dinas Tipe C
	26 Kota Binjai	286	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	27 Kota Gunungsitoli	264	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	28 Kota Medan	220	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	29 Kota Padang Sidempuan	484	KECIL	Dinas Tipe C
	30 Kota Pematang Siantar	325	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)

1	2	3	4	5
	31 Kota Sibolga	132	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	32 Kota Tanjung Balai	528	KECIL	Dinas Tipe C
	33 Kota Tebing Tinggi	325	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
III	Provinsi Sumatera Barat	352	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	1 Kabupaten Agam	330	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	2 Kabupaten Dharmasraya	517	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten Kepulauan Mentawai	209	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	4 Kabupaten Lima Puluh Kota	231	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	5 Kabupaten Padang Pariaman	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	6 Kabupaten Pasaman	352	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	7 Kabupaten Pasaman Barat	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	8 Kabupaten Pesisir Selatan	517	KECIL	Dinas Tipe C
	9 Kabupaten Sijunjung	297	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	10 Kabupaten Solok	583	KECIL	Dinas Tipe C
	11 Kabupaten Solok Selatan	275	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	12 Kabupaten Tanah Datar	528	KECIL	Dinas Tipe C
	13 Kota Bukittinggi	363	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	14 Kota Padang	528	KECIL	Dinas Tipe C
	15 Kota Padang Panjang	121	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	16 Kota Pariaman	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	17 Kota Payakumbuh	176	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	18 Kota Sawahlunto	913	BESAR	Dinas Tipe A
	19 Kota Solok	198	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
IV	Provinsi Riau	330	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	1 Kabupaten Bengkalis	539	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Indragiri Hilir	198	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	3 Kabupaten Indragiri Hulu	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	4 Kabupaten Kampar	594	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Kepulauan Meranti	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	6 Kabupaten Kuantan Singingi	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	7 Kabupaten Pelalawan	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)

1	2	3	4	5
	8 Kabupaten Rokan Hilir	374	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	9 Kabupaten Rokan Hulu	374	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	10 Kabupaten Siak	319	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	11 Kota Dumai	473	KECIL	Dinas Tipe C
	12 Kota Pekanbaru	462	KECIL	Dinas Tipe C
V	Provinsi Kepulauan Riau	210	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	1 Kabupaten Bintan	644	SEDANG	Dinas Tipe B
	2 Kabupaten Karimun	294	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	3 Kabupaten Kepulauan Anambas	252	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	4 Kabupaten Lingga	518	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Natuna	660	SEDANG	Dinas Tipe B
	6 Kota Batam	649	SEDANG	Dinas Tipe B
	7 Kota Tanjung Pinang	440	KECIL	Dinas Tipe C
VI	Provinsi Jambi	176	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	1 Kabupaten Batanghari	385	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	2 Kabupaten Bungo	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	3 Kabupaten Kerinci	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	4 Kabupaten Merangin	528	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Muaro Jambi	440	KECIL	Dinas Tipe C
	6 Kabupaten Sarolangun	572	KECIL	Dinas Tipe C
	7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	9 Kabupaten Tebo	363	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	10 Kota Jambi	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	11 Kota Sungai Penuh	473	KECIL	Dinas Tipe C
VII	Provinsi Sumatera Selatan	638	SEDANG	Dinas Tipe B
	1 Kabupaten Banyuasin	550	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Empat Lawang	429	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten Lahat	528	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Muara Enim	374	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	5 Kabupaten Musi Banyuasin	385	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)

1	2	3	4	5
	6 Kabupaten Musi Rawas	352	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	7 Kabupaten Musi Rawas Utara	682	SEDANG	Dinas Tipe B
	8 Kabupaten Ogan Ilir	396	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	9 Kabupaten Ogan Komering Ilir	550	KECIL	Dinas Tipe C
	10 Kabupaten Ogan Komering Ulu	352	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	583	KECIL	Dinas Tipe C
	12 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	385	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	13 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	330	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	14 Kota Lubuklinggau	198	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	15 Kota Pagar Alam	484	KECIL	Dinas Tipe C
	16 Kota Palembang	473	KECIL	Dinas Tipe C
	17 Kota Prabumulih	330	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
VIII	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	126	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	1 Kabupaten Bangka	490	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Bangka Barat	546	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten Bangka Selatan	252	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	4 Kabupaten Bangka Tengah	420	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Belitung	294	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	6 Kabupaten Belitung Timur	350	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	7 Kota Pangkalpinang	264	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
IX	Provinsi Bengkulu	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	1 Kabupaten Bengkulu Selatan	363	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	2 Kabupaten Bengkulu Tengah	528	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten Bengkulu Utara	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	4 Kabupaten Kaur	220	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	5 Kabupaten Kepahiang	187	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	6 Kabupaten Lebong	209	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	7 Kabupaten Mukomuko	275	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)

1	2	3	4	5
	8 Kabupaten Rejang Lebong	209	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	9 Kabupaten Seluma	297	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	10 Kota Bengkulu	275	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
X	Provinsi Lampung	418	KECIL	Dinas Tipe C
	1 Kabupaten Lampung Barat	495	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Lampung Selatan	660	SEDANG	Dinas Tipe B
	3 Kabupaten Lampung Tengah	572	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Lampung Timur	517	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Lampung Utara	275	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	6 Kabupaten Mesuji	220	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	7 Kabupaten Pesawaran	495	KECIL	Dinas Tipe C
	8 Kabupaten Pesisir Barat	275	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	9 Kabupaten Pringsewu	528	KECIL	Dinas Tipe C
	10 Kabupaten Tanggamus	275	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	11 Kabupaten Tulang Bawang	176	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	12 Kabupaten Tulang Bawang Barat	572	KECIL	Dinas Tipe C
	13 Kabupaten Way Kanan	352	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	14 Kota Bandar Lampung	264	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	15 Kota Metro	418	KECIL	Dinas Tipe C
XI	Provinsi DKI Jakarta			Belum dilakukan pemetaan
	1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu			<i>Belum dilakukan pemetaan</i>
	2 Kota Administrasi Jakarta Barat			<i>Belum dilakukan pemetaan</i>
	3 Kota Administrasi Jakarta Pusat			<i>Belum dilakukan pemetaan</i>
	4 Kota Administrasi Jakarta Selatan			<i>Belum dilakukan pemetaan</i>
	5 Kota Administrasi Jakarta Timur			<i>Belum dilakukan pemetaan</i>
	6 Kota Administrasi Jakarta Utara			<i>Belum dilakukan pemetaan</i>
XII	Provinsi Jawa Barat	440	KECIL	Dinas Tipe C
	1 Kabupaten Bandung	520	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Bandung Barat	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	3 Kabupaten Bekasi	650	SEDANG	Dinas Tipe B

1	2	3	4	5
	4 Kabupaten Bogor	650	SEDANG	Dinas Tipe B
	5 Kabupaten Ciamis	520	KECIL	Dinas Tipe C
	6 Kabupaten Cianjur	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	7 Kabupaten Cirebon	800	SEDANG	Dinas Tipe B
	8 Kabupaten Garut	470	KECIL	Dinas Tipe C
	9 Kabupaten Indramayu	520	KECIL	Dinas Tipe C
	10 Kabupaten Karawang	390	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	11 Kabupaten Kuningan	730	SEDANG	Dinas Tipe B
	12 Kabupaten Majalengka	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	13 Kabupaten Pangandaran	280	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	14 Kabupaten Purwakarta	370	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	15 Kabupaten Subang	510	KECIL	Dinas Tipe C
	16 Kabupaten Sukabumi	470	KECIL	Dinas Tipe C
	17 Kabupaten Sumedang	520	KECIL	Dinas Tipe C
	18 Kabupaten Tasikmalaya	520	KECIL	Dinas Tipe C
	19 Kota Bandung	374	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	20 Kota Banjar	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	21 Kota Bekasi	374	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	22 Kota Bogor	341	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	23 Kota Cimahi	286	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	24 Kota Cirebon	264	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	25 Kota Depok	319	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	26 Kota Sukabumi	484	KECIL	Dinas Tipe C
	27 Kota Tasikmalaya	374	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
XIII	Provinsi Banten	564	KECIL	Dinas Tipe C
	1 Kabupaten Lebak	340	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	2 Kabupaten Pandeglang	470	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten Serang	333	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	4 Kabupaten Tangerang	390	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	5 Kota Cilegon	275	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	6 Kota Serang	391	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)

1	2	3	4	5
	7 Kota Tangerang	374	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	8 Kota Tangerang Selatan	418	KECIL	Dinas Tipe C
XIV	Provinsi Jawa Tengah	340	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	1 Kabupaten Banjarnegara	300	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	2 Kabupaten Banyumas	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	3 Kabupaten Batang	350	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	4 Kabupaten Blora	250	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	5 Kabupaten Boyolali	500	KECIL	Dinas Tipe C
	6 Kabupaten Brebes	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	7 Kabupaten Cilacap	470	KECIL	Dinas Tipe C
	8 Kabupaten Demak	510	KECIL	Dinas Tipe C
	9 Kabupaten Grobogan	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	10 Kabupaten Jepara	600	KECIL	Dinas Tipe C
	11 Kabupaten Karanganyar	300	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	12 Kabupaten Kebumen	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	13 Kabupaten Kendal	370	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	14 Kabupaten Klaten	250	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	15 Kabupaten Kudus	280	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	16 Kabupaten Magelang	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	17 Kabupaten Pati	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	18 Kabupaten Pekalongan	350	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	19 Kabupaten Pemalang	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	20 Kabupaten Purbalingga	370	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	21 Kabupaten Purworejo	500	KECIL	Dinas Tipe C
	22 Kabupaten Rembang	250	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	23 Kabupaten Semarang	250	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	24 Kabupaten Sragen	500	KECIL	Dinas Tipe C
	25 Kabupaten Sukoharjo	390	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	26 Kabupaten Tegal	410	KECIL	Dinas Tipe C
	27 Kabupaten Temanggung	300	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	28 Kabupaten Wonogiri	520	KECIL	Dinas Tipe C

1	2	3	4	5
	29 Kabupaten Wonosobo	250	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	30 Kota Magelang	374	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	31 Kota Pekalongan	473	KECIL	Dinas Tipe C
	32 Kota Salatiga	341	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	33 Kota Semarang	495	KECIL	Dinas Tipe C
	34 Kota Surakarta	671	SEDANG	Dinas Tipe B
	35 Kota Tegal	209	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
XV	Provinsi DI Yogyakarta			Belum dilakukan pemetaan
	1 Kabupaten Bantul	170	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	2 Kabupaten Gunungkidul	430	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten KulonProgo	610	SEDANG	Dinas Tipe B
	4 Kabupaten Sleman	370	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	5 Kota Yogyakarta	561	KECIL	Dinas Tipe C
XVI	Provinsi Jawa Timur	400	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	1 Kabupaten Bangkalan	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	2 Kabupaten Banyuwangi	440	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten Blitar	370	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	4 Kabupaten Bojonegoro	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	5 Kabupaten Bondowoso	300	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	6 Kabupaten Gresik	520	KECIL	Dinas Tipe C
	7 Kabupaten Jember	260	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	8 Kabupaten Jombang	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	9 Kabupaten Kediri	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	10 Kabupaten Lamongan	120	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	11 Kabupaten Lumajang	120	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	12 Kabupaten Madiun	132	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	13 Kabupaten Magetan	330	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	14 Kabupaten Malang	520	KECIL	Dinas Tipe C
	15 Kabupaten Mojokerto	370	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	16 Kabupaten Nganjuk	490	KECIL	Dinas Tipe C
	17 Kabupaten Ngawi	120	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)

1	2	3	4	5
	18 Kabupaten Pacitan	420	KECIL	Dinas Tipe C
	19 Kabupaten Pamekasan	250	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	20 Kabupaten Pasuruan	630	SEDANG	Dinas Tipe B
	21 Kabupaten Ponorogo	300	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	22 Kabupaten Probolinggo	470	KECIL	Dinas Tipe C
	23 Kabupaten Sampang	180	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	24 Kabupaten Sidoarjo	390	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	25 Kabupaten Situbondo	300	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	26 Kabupaten Sumenep	250	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	27 Kabupaten Trenggalek	300	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	28 Kabupaten Tuban	120	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	29 Kabupaten Tulungagung	320	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	30 Kota Batu	484	KECIL	Dinas Tipe C
	31 Kota Blitar	187	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	32 Kota Kediri	132	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	33 Kota Madiun	190	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	34 Kota Malang	460	KECIL	Dinas Tipe C
	35 Kota Mojokerto	100	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	36 Kota Pasuruan	270	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	37 Kota Probolinggo	240	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	38 Kota Surabaya	858	BESAR	Dinas Tipe A
XVII	Provinsi Kalimantan Barat			Belum dilakukan pemetaan
	1 Kabupaten Bengkayang	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	2 Kabupaten Kapuas Hulu	392	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	3 Kabupaten Kayong Utara	341	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	4 Kabupaten Ketapang	550	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Kubu Raya	385	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	6 Kabupaten Landak	528	KECIL	Dinas Tipe C
	7 Kabupaten Melawi	528	KECIL	Dinas Tipe C
	8 Kabupaten Mempawah	528	KECIL	Dinas Tipe C
	9 Kabupaten Sambas	322	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)

1	2	3	4	5
	10 Kabupaten Sanggau	352	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	11 Kabupaten Sekadau	605	SEDANG	Dinas Tipe B
	12 Kabupaten Sintang	528	KECIL	Dinas Tipe C
	13 Kota Pontianak	374	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	14 Kota Singkawang	506	KECIL	Dinas Tipe C
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	660	SEDANG	Dinas Tipe B
	1 Kabupaten Barito Selatan	561	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Barito Timur	275	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	3 Kabupaten Barito Utara	506	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Gunung Mas	440	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Kapuas	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	6 Kabupaten Katingan	363	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	7 Kabupaten Kotawaringin Barat	215	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	8 Kabupaten Kotawaringin Timur	330	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	9 Kabupaten Lamandau	473	KECIL	Dinas Tipe C
	10 Kabupaten Murung Raya	418	KECIL	Dinas Tipe C
	11 Kabupaten Pulang Pisau	495	KECIL	Dinas Tipe C
	12 Kabupaten Seruyan	583	KECIL	Dinas Tipe C
	13 Kabupaten Sukamara			<i>Belum dilakukan pemetaan</i>
	14 Kota Palangkaraya	352	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	198	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	1 Kabupaten Balangan	396	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	2 Kabupaten Banjar	583	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten Barito Kuala	528	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Hulu Sungai Selatan	363	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	5 Kabupaten Hulu Sungai Tengah	363	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	6 Kabupaten Hulu Sungai Utara	528	KECIL	Dinas Tipe C
	7 Kabupaten Kotabaru	528	KECIL	Dinas Tipe C
	8 Kabupaten Tabalong	396	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	9 Kabupaten Tanah Bumbu	528	KECIL	Dinas Tipe C
	10 Kabupaten Tanah Laut	528	KECIL	Dinas Tipe C

1	2	3	4	5
	11 Kabupaten Tapin	506	KECIL	Dinas Tipe C
	12 Kota Banjarbaru	286	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	13 Kota Banjarmasin	341	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
XX	Provinsi Kalimantan Timur	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	1 Kabupaten Berau	528	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Kutai Barat	495	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten Kutai Kartanegara	627	SEDANG	Dinas Tipe B
	4 Kabupaten Kutai Timur	825	BESAR	Dinas Tipe A
	5 Kabupaten Mahakam Ulu	407	KECIL	Dinas Tipe C
	6 Kabupaten Paser	528	KECIL	Dinas Tipe C
	7 Kabupaten Penajam Paser Utara	330	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	8 Kota Balikpapan	858	BESAR	Dinas Tipe A
	9 Kota Bontang	495	KECIL	Dinas Tipe C
	10 Kota Samarinda	517	KECIL	Dinas Tipe C
XXI	Provinsi Kalimantan Utara	630	SEDANG	Dinas Tipe B
	1 Kabupaten Bulungan	517	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Malinau	392	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	3 Kabupaten Nunukan	420	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Tana Tidung	431	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kota Tarakan	396	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
XXII	Provinsi Sulawesi Utara	574	KECIL	Dinas Tipe C
	1 Kabupaten Bolaang Mongondow	478	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	407	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	550	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	478	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Kepulauan Sangihe	644	SEDANG	Dinas Tipe B
	6 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	490	KECIL	Dinas Tipe C

1	2	3	4	5
	7 Kabupaten Kepulauan Talaud	252	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	8 Kabupaten Minahasa	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	9 Kabupaten Minahasa Selatan	528	KECIL	Dinas Tipe C
	10 Kabupaten Minahasa Tenggara	242	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	11 Kabupaten Minahasa Utara	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	12 Kota Bitung	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	13 Kota Kotamobagu	385	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	14 Kota Manado	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	15 Kota Tomohon	253	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
XXIII	Provinsi Gorontalo	564	KECIL	Dinas Tipe C
	1 Kabupaten Boalemo	220	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	2 Kabupaten Bone Bolango	461	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten Gorontalo	506	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Gorontalo Utara	484	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Pohuwato	330	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	6 Kota Gorontalo	483	KECIL	Dinas Tipe C
XXIV	Provinsi Sulawesi Tengah	429	KECIL	Dinas Tipe C
	1 Kabupaten Banggai	605	SEDANG	Dinas Tipe B
	2 Kabupaten Banggai Kepulauan	275	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	3 Kabupaten Banggai Laut	363	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	4 Kabupaten Buol	286	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	5 Kabupaten Donggala	528	KECIL	Dinas Tipe C
	6 Kabupaten Morowali	627	SEDANG	Dinas Tipe B
	7 Kabupaten Morowali Utara	352	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	8 Kabupaten Parigi Moutong	638	SEDANG	Dinas Tipe B
	9 Kabupaten Poso	396	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	10 Kabupaten Sigi	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	11 Kabupaten Tojo Una-una	550	KECIL	Dinas Tipe C
	12 Kabupaten Toli-toli	297	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	13 Kota Palu	506	KECIL	Dinas Tipe C

1	2	3	4	5
XXV	Provinsi Sulawesi Selatan	429	KECIL	Dinas Tipe C
	1 Kabupaten Bantaeng	473	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Barru	616	SEDANG	Dinas Tipe B
	3 Kabupaten Bone	638	SEDANG	Dinas Tipe B
	4 Kabupaten Bulukumba	528	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Enrekang	352	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	6 Kabupaten Gowa	550	KECIL	Dinas Tipe C
	7 Kabupaten Jeneponto	451	KECIL	Dinas Tipe C
	8 Kabupaten Kepulauan Selayar	254	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	9 Kabupaten Luwu	572	KECIL	Dinas Tipe C
	10 Kabupaten Luwu Timur	528	KECIL	Dinas Tipe C
	11 Kabupaten Luwu Utara	572	KECIL	Dinas Tipe C
	12 Kabupaten Maros	418	KECIL	Dinas Tipe C
	13 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	448	KECIL	Dinas Tipe C
	14 Kabupaten Pinrang	374	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	15 Kabupaten Sidenreng Rappang	528	KECIL	Dinas Tipe C
	16 Kabupaten Sinjai	363	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	17 Kabupaten Soppeng	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	18 Kabupaten Takalar	440	KECIL	Dinas Tipe C
	19 Kabupaten Tana Toraja	330	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	20 Kabupaten Toraja Utara	869	BESAR	Dinas Tipe A
	21 Kabupaten Wajo	528	KECIL	Dinas Tipe C
	22 Kota Makassar	770	SEDANG	Dinas Tipe B
	23 Kota Palopo	630	SEDANG	Dinas Tipe B
	24 Kota Parepare	506	KECIL	Dinas Tipe C
XXVI	Provinsi Sulawesi Barat	473	KECIL	Dinas Tipe C
	1 Kabupaten Majene	440	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Mamasa	407	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten Mamuju	418	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Mamuju Tengah	319	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)

1	2	3	4	5
	5 Kabupaten Mamuju Utara	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	6 Kabupaten Polewali Mandar	374	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
XXVII	Provinsi Sulawesi Tenggara	264	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	1 Kabupaten Buton Selatan	452	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Buton Tengah	672	SEDANG	Dinas Tipe B
	3 Kabupaten Muna Barat	406	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Bombana	539	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Buton	221	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	6 Kabupaten Buton Utara	462	KECIL	Dinas Tipe C
	7 Kabupaten Kolaka	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	8 Kabupaten Kolaka Timur	261	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	9 Kabupaten Kolaka Utara	363	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	10 Kabupaten Konawe	214	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	11 Kabupaten Konawe Kepulauan	471	KECIL	Dinas Tipe C
	12 Kabupaten Konawe Selatan	398	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	13 Kabupaten Konawe Utara	398	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	14 Kabupaten Muna	462	KECIL	Dinas Tipe C
	15 Kabupaten Wakatobi	204	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	16 Kota Baubau	221	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	17 Kota Kendari	581	KECIL	Dinas Tipe C
XXVIII	Provinsi Bali	200	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	1 Kabupaten Badung	300	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	2 Kabupaten Bangli	300	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	3 Kabupaten Buleleng	470	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Gianyar	620	SEDANG	Dinas Tipe B
	5 Kabupaten Jembrana	450	KECIL	Dinas Tipe C
	6 Kabupaten Karangasem	290	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	7 Kabupaten Klungkung	680	SEDANG	Dinas Tipe B
	8 Kabupaten Tabanan	280	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	9 Kota Denpasar	649	SEDANG	Dinas Tipe B

1	2	3	4	5
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Barat	406	KECIL	Dinas Tipe C
	1 Kabupaten Bima	360	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	2 Kabupaten Dompu	336	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	3 Kabupaten Lombok Barat	936	BESAR	Dinas Tipe A
	4 Kabupaten Lombok Tengah	960	BESAR	Dinas Tipe A
	5 Kabupaten Lombok Timur	756	SEDANG	Dinas Tipe B
	6 Kabupaten Lombok Utara	372	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	7 Kabupaten Sumbawa	336	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	8 Kabupaten Sumbawa Barat	312	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	9 Kota Bima	187	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	10 Kota Mataram	418	KECIL	Dinas Tipe C
XXX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	378	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	1 Kabupaten Alor	546	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Belu	240	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	3 Kabupaten Ende	472	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Flores Timur	648	SEDANG	Dinas Tipe B
	5 Kabupaten Kupang	660	SEDANG	Dinas Tipe B
	6 Kabupaten Lembata	504	KECIL	Dinas Tipe C
	7 Kabupaten Malaka	420	KECIL	Dinas Tipe C
	8 Kabupaten Manggarai	432	KECIL	Dinas Tipe C
	9 Kabupaten Manggarai Barat	564	KECIL	Dinas Tipe C
	10 Kabupaten Manggarai Timur	900	BESAR	Dinas Tipe A
	11 Kabupaten Nagekeo	624	SEDANG	Dinas Tipe B
	12 Kabupaten Ngada	540	KECIL	Dinas Tipe C
	13 Kabupaten Rote Ndao	288	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	14 Kabupaten Sabu Raijua	276	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	15 Kabupaten Sikka	456	KECIL	Dinas Tipe C
	16 Kabupaten Sumba Barat	768	SEDANG	Dinas Tipe B
	17 Kabupaten Sumba Barat Daya	312	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	18 Kabupaten Sumba Tengah	504	KECIL	Dinas Tipe C
	19 Kabupaten Sumba Timur	504	KECIL	Dinas Tipe C

1	2	3	4	5
	20 Kabupaten Timor Tengah Selatan	420	KECIL	Dinas Tipe C
	21 Kabupaten Timor Tengah Utara	360	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	22 Kota Kupang	440	KECIL	Dinas Tipe C
XXXI	Provinsi Maluku	308	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	1 Kabupaten Seram Bagian Timur	493	KECIL	Dinas Tipe C
	2 Kabupaten Buru	588	KECIL	Dinas Tipe C
	3 Kabupaten Buru Selatan	493	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Kepulauan Aru	420	KECIL	Dinas Tipe C
	5 Kabupaten Maluku Barat Daya	336	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	6 Kabupaten Maluku Tengah	434	KECIL	Dinas Tipe C
	7 Kabupaten Maluku Tenggara	448	KECIL	Dinas Tipe C
	8 Kabupaten Maluku Tenggara Barat	600	KECIL	Dinas Tipe C
	9 Kabupaten Seram Bagian Barat	444	KECIL	Dinas Tipe C
	10 Kota Ambon	330	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	11 Kota Tual	682	SEDANG	Dinas Tipe B
XXXII	Provinsi Maluku Utara	180	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	1 Kabupaten Halmahera Barat	378	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	2 Kabupaten Halmahera Selatan	378	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	3 Kabupaten Halmahera Tengah	378	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	4 Kabupaten Halmahera Timur	276	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	5 Kabupaten Halmahera Utara	480	KECIL	Dinas Tipe C
	6 Kabupaten Kepulauan Sula	456	KECIL	Dinas Tipe C
	7 Kabupaten Pulau Morotai	350	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	8 Kabupaten Pulau Taliabu	180	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	9 Kota Ternate	374	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	10 Kota Tidore Kepulauan	501	KECIL	Dinas Tipe C
XXXIII	Provinsi Papua			Belum dilakukan pemetaan
	1 Kabupaten Asmat	845	BESAR	Dinas Tipe A
	2 Kabupaten Biak Numfor	980	BESAR	Dinas Tipe A
	3 Kabupaten Boven Digoel	462	KECIL	Dinas Tipe C
	4 Kabupaten Deiyai	651	SEDANG	Dinas Tipe B

1	2	3	4	5
	5 Kabupaten Dogiyai	994	BESAR	Dinas Tipe A
	6 Kabupaten Intan Jaya	644	SEDANG	Dinas Tipe B
	7 Kabupaten Jayapura	728	SEDANG	Dinas Tipe B
	8 Kabupaten Jayawijaya	630	SEDANG	Dinas Tipe B
	9 Kabupaten Lanny Jaya	784	SEDANG	Dinas Tipe B
	10 Kabupaten Mamberamo Raya	392	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	11 Kabupaten Mamberamo Tengah	392	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	12 Kabupaten Mappi	560	KECIL	Dinas Tipe C
	13 Kabupaten Merauke	728	SEDANG	Dinas Tipe B
	14 Kabupaten Mimika	1344	BESAR	Dinas Tipe A
	15 Kabupaten Nabire	644	SEDANG	Dinas Tipe B
	16 Kabupaten Nduga	658	SEDANG	Dinas Tipe B
	17 Kabupaten Paniai	994	BESAR	Dinas Tipe A
	18 Kabupaten Pegunungan Bintang	630	SEDANG	Dinas Tipe B
	19 Kabupaten Puncak	924	BESAR	Dinas Tipe A
	20 Kabupaten Puncak Jaya	588	KECIL	Dinas Tipe C
	21 Kabupaten Sarmi	336	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)
	22 Kabupaten Supiori	518	KECIL	Dinas Tipe C
	23 Kabupaten Tolikara	448	KECIL	Dinas Tipe C
	24 Kabupaten Waropen	490	KECIL	Dinas Tipe C
	25 Kabupaten Yahukimo	630	SEDANG	Dinas Tipe B
	26 Kabupaten Yalimo	728	SEDANG	Dinas Tipe B
	27 Kabupaten Kepulauan Yapen	980	BESAR	Dinas Tipe A
	28 Kabupaten Keerom	630	SEDANG	Dinas Tipe B
	29 Kota Jayapura	483	KECIL	Dinas Tipe C
XXXIV	Provinsi Papua Barat	714	SEDANG	Dinas Tipe B
	1 Kabupaten Fakfak	1050	BESAR	Dinas Tipe A
	2 Kabupaten Kaimana	238	SANGAT SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
	3 Kabupaten Manokwari	756	SEDANG	Dinas Tipe B
	4 Kabupaten Manokwari Selatan	756	SEDANG	Dinas Tipe B
	5 Kabupaten Maybrat	756	SEDANG	Dinas Tipe B

1	2	3	4	5
	6 Kabupaten Pegunungan Arfak	756	SEDANG	Dinas Tipe B
	7 Kabupaten Raja Ampat	834	BESAR	Dinas Tipe A
	8 Kabupaten Sorong	756	SEDANG	Dinas Tipe B
	9 Kabupaten Sorong Selatan	756	SEDANG	Dinas Tipe B
	10 Kabupaten Tambrau	756	SEDANG	Dinas Tipe B
	11 Kabupaten Teluk Bintuni	756	SEDANG	Dinas Tipe B
	12 Kabupaten Teluk Wondama	756	SEDANG	Dinas Tipe B
	13 Kota Sorong	363	SANGAT KECIL	Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang)

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMETAAN DAN PEDOMAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG
PERTANAHAN

PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menyusun pengelompokan tugas dan fungsi bidang pertanahan yang telah dilakukan bersama dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya dilaksanakan pemetaan urusan bidang pertanahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Hasil pemetaan urusan bidang pertanahan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun perangkat daerah dengan berpedoman sebagai berikut:

1. Dinas Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja besar atau dengan nilai pemetaan lebih dari 800 (delapan ratus), sebagai berikut:

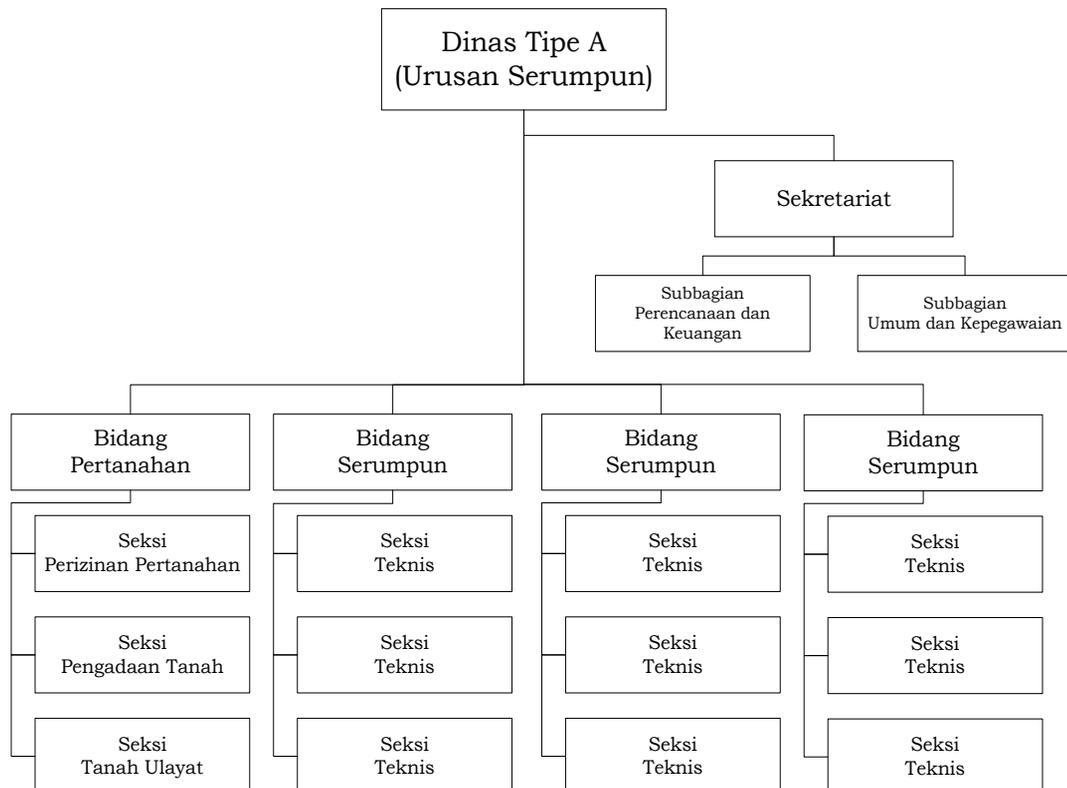
Dinas Tipe A Provinsi, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pertanahan, dengan tugas meliputi:
 - 1) Pemberian izin lokasi, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - 2) Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi, serta perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - 3) Penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- c. Bidang Serumpun, yang menangani urusan serumpun dengan pertanahan.
- d. Bidang Serumpun, yang menangani urusan serumpun dengan pertanahan; dan
- e. Bidang Serumpun, yang menangani urusan serumpun dengan pertanahan.

Dinas Tipe A Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pertanahan, dengan tugas meliputi:
 - 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota;
 - 2) Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - 3) Penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam daerah kabupaten/kota.
- c. Bidang Serumpun, yang menangani urusan serumpun dengan pertanahan.
- d. Bidang Serumpun, yang menangani urusan serumpun dengan pertanahan; dan
- e. Bidang Serumpun, yang menangani urusan serumpun dengan pertanahan.

Bagan struktur organisasi Dinas Tipe A



2. Dinas Tipe B untuk mawadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja sedang atau dengan nilai pemetaan lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus), sebagai berikut:

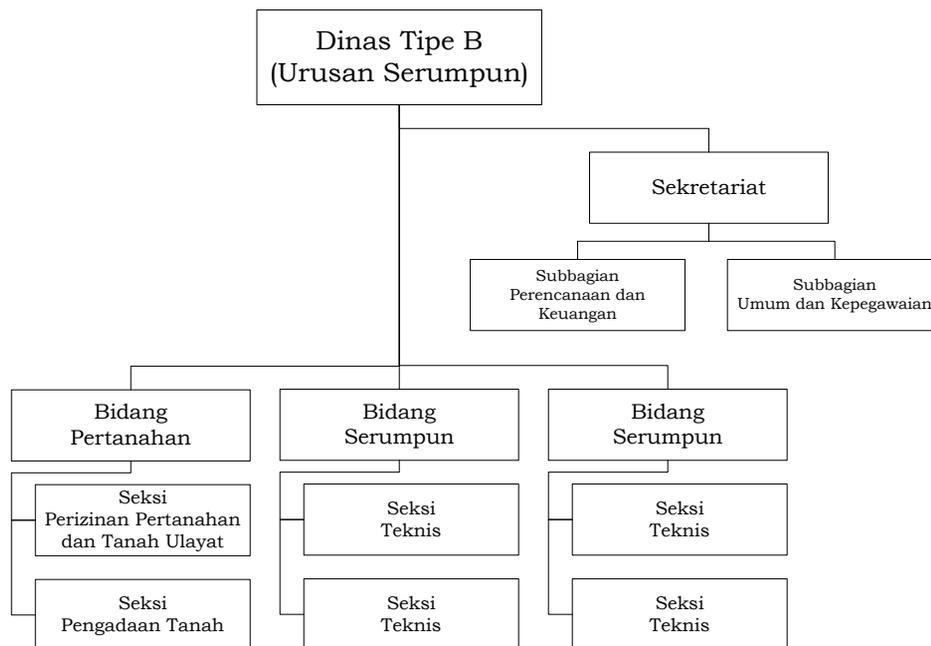
Dinas Tipe B Provinsi, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pertanahan, dengan tugas meliputi:
 - 1) Pemberian izin lokasi, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - 2) Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi, serta perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- c. Bidang Serumpun, yang menangani urusan serumpun dengan pertanahan; dan
- d. Bidang Serumpun, yang menangani urusan serumpun dengan pertanahan.

Dinas Tipe B Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pertanahan, dengan tugas meliputi:
 - 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota, penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - 2) Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota.
- c. Bidang Serumpun, yang menangani urusan serumpun dengan pertanahan; dan
- d. Bidang Serumpun, yang menangani urusan serumpun dengan pertanahan.

Bagan struktur organisasi Dinas Tipe B



3. Dinas Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja kecil atau dengan nilai pemetaan lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus), terdiri dari:

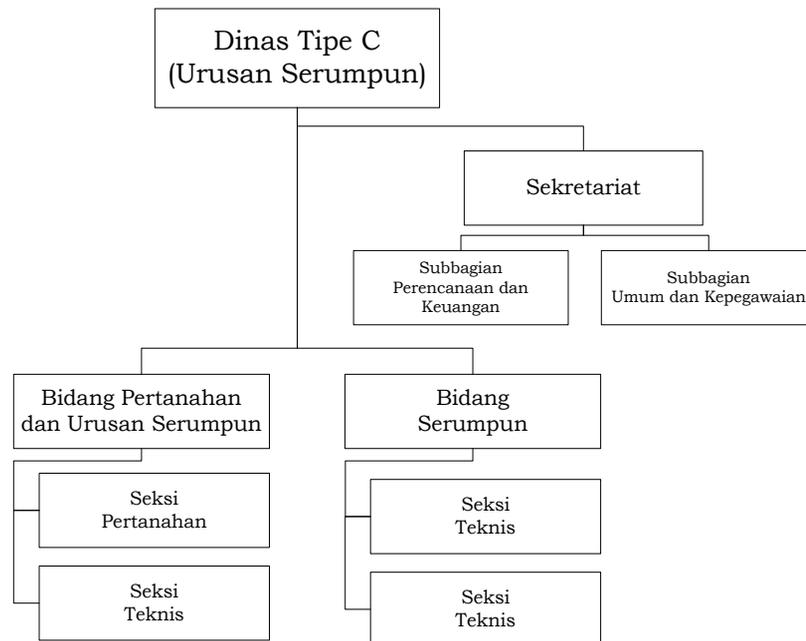
Dinas Tipe C Provinsi, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pertanahan dan Urusan Serumpun, dengan tugas meliputi:
 - 1) Pemberian izin lokasi, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi, serta perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - 2) Urusan lain yang serumpun dengan pertanahan.
- c. Bidang Serumpun, yang menangani urusan serumpun dengan pertanahan.

Dinas Tipe C Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pertanahan dan Urusan Serumpun, dengan tugas meliputi:
 - 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota, penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam daerah kabupaten/kota, fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota.
 - 2) Urusan lain yang serumpun dengan pertanahan.
- c. Bidang Serumpun, yang menangani urusan serumpun dengan pertanahan.

Bagan struktur organisasi Dinas Tipe C



4. Setingkat Bidang untuk mewisadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja sangat kecil dengan nilai pemetaan lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus), dengan rincian tugas sebagaimana kelompok pertanahan pada Dinas Tipe B atau Dinas Tipe C.
5. Setingkat Subbidang/Seksi untuk mewisadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja sangat sangat kecil dengan nilai pemetaan kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus), dengan rincian tugas sebagaimana kelompok pertanahan pada Dinas Tipe C.

6. Sekretariat mempunyai tugas meliputi perencanaan program dan anggaran, tata kelola keuangan, penataan sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, bisnis proses/tatalaksana, kehumasan, publikasi dan pusat data, serta dukungan tugas lainnya.
7. Urusan pemerintahan lainnya yang serumpun dengan urusan pemerintahan bidang pertanahan yaitu perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.
8. Dalam hal kemampuan keuangan atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah yang terbatas, tipe perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pertanahan dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Demikian untuk dipedomani dalam penataan organisasi perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang pertanahan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL